

**URGENSI REFORMULASI SANKSI PIDANA PEMILU DALAM
MEWUJUDKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL*****THE URGENCY OF REFORMULATION OF CRIMINAL ELECTION SANCTIONS
IN REALIZING HONEST AND FAIR ELECTIONS*****Muhammad Ikhwan
Rahman¹**Fakultas Hukum Prodi
Hukum BisnisUniversitas
MuhammadiyahMakassar¹

email:

Muhammadikhwanrahman@unismuh.ac.id

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 5, No. 3, pp. 246-256

Juli 2025

Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih jauh dari prinsip jujur dan adil sebab masih maraknya pelanggaran yang terjadi termasuk pelanggaran pidana dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana saat ini tidak efektif dalam mencegah pelanggaran pemilu. Tujuan penelitian untuk mengkaji urgensi reformulasi/perbaikan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu agar lebih menjamin pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan meninjau literatur dan perundang-undangan. Metode yuridis-normatif digunakan, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian perskriptif hubungan hukum. Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif-analitis. Metode penelitian kepustakaan, atau metode penelitian kepustakaan, digunakan untuk mengumpulkan data dengan memeriksa bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan reformulasi sanksi pidana pemilu perlu dilakukan agar pemilu dapat berlangsung secara jujur dan adil. Dengan adanya sanksi yang lebih tegas dan efektif, diharapkan akan menekan angka pelanggaran pidana dalam pemilu dan memastikan kelancaran proses demokrasi di Indonesia guna mewujudkan pemilu yang lebih jujur dan adil.

Kata Kunci: Reformulasi Sanksi; Tindak Pidana Pemilu.

Abstract: The implementation of elections in Indonesia is still far from the principle of honesty and fairness because there are still many violations that occur, including criminal violations in elections. This shows that current criminal sanctions are not effective in preventing election violations. This study uses a normative legal research method, which involves reviewing literature and legislation. The purpose of the study is to examine the urgency of reformulating/improving criminal sanctions in the Election Law in order to better guarantee honest and fair elections. The juridical-normative method is used, and the type of research used is prescriptive legal relationship research. This study has descriptive-analytical characteristics. The library research method, or library research method, is used to collect data by examining document materials and library materials used in the study. The results of the study indicate that reformulation of criminal sanctions for elections needs to be carried out so that elections can take place honestly and fairly. With stricter and more effective sanctions, it is hoped that it will reduce the number of criminal violations in elections and ensure the smooth running of the democratic process in Indonesia in order to realize more honest and fair elections.

Keywords: Reformulation of Sanctions; Election Crime.

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana demokrasi yang harus dijamin kejujuran dan keadilannya. Namun, masih terdapat banyak pelanggaran pidana yang terjadi selama pemilu berlangsung, meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Tindak Pindak sebelum terbitnya Undang-Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Moeljatno, 2021).

Untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil perlu dilakukan peningkatan

pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokrasi (Azis & Azhar 2024). Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dapat semakin meningkat, sehingga hasil yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu dapat dicapai dengan memastikan bahwa seluruh tahapan proses, mulai dari

pendaftaran calon hingga penghitungan suara, dilakukan secara terbuka dan adil. dapat diawasi oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu, perlu juga adanya mekanisme pengawasan yang independen dan profesional untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku (Chairy Maghfirah Dasraf, 2024). Dengan demikian, pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan adil, serta mampu menciptakan suasana demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Sanksi pidana merupakan salah satu instrumen pengendali perilaku peserta dan penyelenggara pemilu. Sanksi pidana dapat menjadi ancaman yang efektif bagi para pelanggar hukum dalam pemilu. Dengan adanya sanksi yang tegas dan berlaku adil, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu (Azis & Azhar, 2024). Oleh karena itu, penting bagi Lembaga pengawas pemilu untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan baik dan memberikan efek jera bagi para pelanggar. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi pemilu dapat tetap terjaga.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi. Selain itu, peran media massa sebagai pengawas independen juga harus diperkuat agar setiap pelanggaran dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih pemimpin dengan lebih yakin dan yakin bahwa suara mereka benar-benar diwakili dengan adil.

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran juga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pemilu yang bersih dan demokratis. Dengan adanya kerjasama antara lembaga pengawas, media massa, dan

masyarakat, diharapkan bahwa pemilu di masa depan akan menjadi contoh bagi negara lain dalam menjalankan proses demokrasi yang transparan dan adil. Adanya mekanisme pengawasan yang kuat juga akan membantu dalam mencegah terjadinya manipulasi dan kecurangan selama pemilu, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dapat terjaga dengan baik.

Rumusan sanksi pidana dalam UU Pemilu dinilai tidak memberikan efek jera, tidak tegas, atau multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap UU Pemilu untuk memperbaiki rumusan sanksi pidana agar lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku kecurangan. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu guna mencegah terjadinya manipulasi. Dengan langkah-langkah ini diimplementasikan, diharapkan Indonesia dapat terus maju menuju sistem demokrasi yang lebih kuat dan berkembang.

Dalam konteks ini, penting juga untuk memperkuat lembaga-lembaga pengawas pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, agar lebih efektif dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu. Selain itu, perlu adanya peningkatan dalam pemahaman hukum dan etika politik bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan lebih transparan, adil, dan demokratis.

Selain itu, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Pendidikan politik yang lebih baik dan akses yang lebih mudah ke informasi tentang calon dan program politik akan membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam memilih pemimpin yang memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Tidak hanya lembaga

pemilu dan pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat, yang bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan dan kemajuan negara, harus berusaha memperkuat demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pentingnya reformulasi sanksi pidana untuk memperkuat integritas pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlunya perubahan dalam pengaturan sanksi pidana dalam UU No. 7 Tahun 2017 guna meningkatkan kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Pada penelitian ini mengkaji urgensi reformulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu guna menjamin terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil, serta menelaah pentingnya perubahan pengaturan sanksi pidana dalam UU No. 7 Tahun 2017 untuk memperkuat integritas dan kualitas pelaksanaan pemilu.

METODE ANALISIS

Metode Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini (Marzuki. P. M. 2010). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif hubungan hukum dengan karakteristik deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yaitu dengan memeriksa bahan dokumen dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, yang secara fundamental diamanatkan untuk berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, masih dihadapkan pada tantangan signifikan terkait maraknya pelanggaran pidana. Meskipun sanksi pidana dalam hukum pemilu bertujuan

untuk menjaga integritas dan kejujuran proses pemilihan serta memberikan efek jera, rumusan sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dinilai belum efektif dalam mencegah pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana saat ini tidak mampu secara optimal menekan angka pelanggaran pidana dalam pemilu.

Salah satu kelemahan normatif utama dalam rumusan sanksi pidana Pemilu adalah sifatnya yang multitafsir atau kabur, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Contohnya, Pasal 492 UU Pemilu mengenai kampanye di luar jadwal seringkali menjadi perdebatan. Selain itu, banyak tindak pidana pemilu memiliki ancaman hukuman di bawah lima tahun yang tidak bisa dilakukan upaya penahanan. Kondisi ini menciptakan celah bagi pelaku untuk mengulur waktu guna menghindari jerat hukum sebab proses penanganan pidana pemilu berdasarkan undang-undang terbilang singkat sehingga penegak hukum akan kehilangan hak penanganan perkara karena jangka waktu sudah lewat atau daluarsa. Kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum juga menjadi salah satu kelemahan dalam menegakkan aturan terkait pemilu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki dan menguatkan sistem hukum terkait pemilu guna menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Sanksi yang diberikan seringkali dianggap terlalu ringan dan tidak mampu memberikan efek jera yang cukup kuat, sehingga tidak mampu mengurangi praktik *money politics* dan tindakan pidana pemilu lainnya secara signifikan. Beberapa pasal juga dinilai tidak operasional dalam praktik, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik masyarakat dan merugikan prinsip demokrasi itu sendiri.

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Undang-Undang Dasar 1945, 2001). Pemilu merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Prinsip jurdil dalam pemilu menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan integritas dalam setiap tahapan proses pemilihan umum. Dengan adanya mekanisme pemilu yang transparan dan adil, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sanksi pidana dalam hukum pemilu memiliki tujuan dan fungsi yang penting dalam menjaga integritas dan kejujuran proses pemilihan umum. Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pemilu, serta memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan. Dengan adanya sanksi pidana yang tegas dan efektif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum.

Konsep reformulasi hukum dalam teori perundang-undangan mengacu pada upaya untuk memperbarui dan meningkatkan ketentuan hukum yang ada agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Reformulasi hukum bertujuan untuk menyesuaikan regulasi hukum dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan melakukan reformulasi hukum, diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, efisien, dan adil bagi seluruh warga negara. Selain itu, perlu juga memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam pembentukan regulasi hukum yang baru. Dengan demikian, reformulasi hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang lebih baik dan berkelanjutan bagi Masyarakat.

Pengaturan Sanksi Pidana dalam UU No. 7 Tahun 2017

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), meskipun bertujuan menjaga integritas dan kejujuran proses pemilihan serta memberikan efek jera, dinilai belum efektif secara optimal dalam mencegah pelanggaran pidana pemilu. Tindak pidana pemilu masih marak terjadi pada perhelatan pemilu di Indonesia, terutama tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun yang tidak bisa dilakukan upaya penahanan. Hal ini dapat menjadi celah yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk mengulur waktu agar menghindari jerat hukum sebab proses penanganan pidana pemilu berdasarkan undang-undang terbilang singkat sehingga penegak hukum akan kehilangan hak penanganan perkara karena jangka waktu sudah lewat atau daluarsa.

Kriteria efektivitas sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 haruslah jelas dan tegas agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pemilu. Selain itu, sanksi pidana juga harus rasional dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, diharapkan pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang tersebut dapat memberikan efek preventif dan mengurangi angka pelanggaran pemilu di Indonesia.

Namun, meskipun telah diatur dengan jelas dalam UU No. 7 Tahun 2017, implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran pemilu masih seringkali menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa sanksi yang diberikan terlalu ringan dan tidak mampu memberikan efek jera yang cukup kuat, sehingga tidak mampu mengurangi praktik *money politics* dan Tindakan pidana pemilu lainnya secara signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme penerapan sanksi pidana dalam UU tersebut guna memastikan bahwa

hukuman yang diberikan benar-benar efektif dalam mencegah pelanggaran pemilu di masa mendatang.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum tanpa adanya tekanan atau intimidasi (Taufiqurrahman & Amal, 2022). Evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran pemilu akan menjadi langkah penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, perlunya pendekatan yang bijaksana dalam memberikan sanksi agar tidak menimbulkan ketakutan yang berlebihan namun tetap efektif dalam menegakkan aturan hukum juga perlu menjadi perhatian utama dalam upaya memperbaiki sistem pemilu di Indonesia.

Upaya untuk melibatkan lebih banyak pemilih, terutama generasi muda, dalam proses demokrasi juga merupakan langkah yang penting untuk memperkuat legitimasi sistem demokrasi di Indonesia. Melalui Pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat dicapai melalui "penyerahan" sebagian dari kekuasaan tersebut kepada anggota legislatif dan pemerintahan saat ini. Dengan menggunakan mekanisme ini, orang-orang dapat meminta kekuasaan untuk bertanggung jawab kepada pemerintah (Taufiqurrahman & Amal, 2022).

Selain itu pendidikan politik yang baik dan memfasilitasi partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan pemilih yang cerdas dan kritis serta mendorong terciptanya pemilu yang lebih adil dan transparan di masa depan. Selain itu, peran media massa dan lembaga pemantau pemilu juga sangat penting dalam mengawasi jalannya proses pemilihan umum dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang ada. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus

melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan pemahaman yang baik terhadap proses demokrasi. Dengan adanya pemahaman yang kuat, masyarakat akan lebih aktif dan cerdas dalam memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu juga harus ditingkatkan agar masyarakat merasa yakin bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan adil. Dengan demikian, langkah-langkah ini akan membantu memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia dan menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada.

Selain itu, pendidikan politik dan peran media massa sangat penting dalam membangun masyarakat yang cerdas secara politik dan aktif dalam proses demokrasi. Melalui pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan melalui akses ke informasi yang objektif dari media, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang membantu kemajuan negara. Akibatnya, upaya untuk meningkatkan pendidikan politik dan memperkuat peran media massa harus terus dilakukan demi menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan bertanggung jawab.

Dengan adanya kesadaran politik yang tinggi, masyarakat dapat lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda politik yang bias. Hal ini akan memungkinkan terciptanya lingkungan politik yang lebih sehat dan transparan, di mana keputusan politik yang diambil lebih didasarkan pada kepentingan publik daripada kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi juga akan memperkuat legitimasi pemerintah dan menjaga stabilitas politik negara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pendidikan politik dan memperkuat regulasi terhadap media massa harus terus dilakukan sebagai

bagian dari upaya memperkuat demokrasi di Indonesia.

Hal ini juga penting untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Dengan adanya kontrol yang ketat terhadap penyebaran informasi dan pelaksanaan pemilu, diharapkan akan tercipta lingkungan politik yang sehat dan demokratis. Selain itu, pendidikan politik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pemilihan umum. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih kuat dan stabil dalam menjalankan sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kelemahan Normatif dalam Rumusan Sanksi Pidana Pemilu

Kelemahan normatif utama terletak pada rumusan sanksi yang multitafsir atau kabur, seperti contohnya Pasal 492 UU Pemilu yang sering memicu perdebatan. Banyak tindak pidana pemilu juga memiliki ancaman hukuman di bawah lima tahun, yang tidak memungkinkan upaya penahanan, sehingga menciptakan celah bagi pelaku untuk mengulur waktu dan menghindari jerat hukum mengingat singkatnya durasi penanganan perkara.

Pasal 492 Undang-Undang Pemilu tentang Kampanye di luar jadwal sering menjadi perdebatan (Undang-Undang No 7, 2017). Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum juga menjadi salah satu kelemahan dalam menegakkan aturan terkait pemilu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki dan menguatkan sistem hukum terkait pemilu guna menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti

Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, dalam menangani pelanggaran pemilu secara efektif (Rusmana, 2024). Selain itu, perlu adanya revisi dan klarifikasi dalam rumusan sanksi pidana pemilu agar tidak terjadi multitafsir yang dapat merugikan proses hukum. Dengan demikian, diharapkan bahwa sistem hukum terkait pemilu dapat menjadi lebih kuat dan efisien dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

Langkah lain yang dapat diambil adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, dan penyuluhan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu. Selain itu, perlu juga adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat dapat mempercayai hasil pemilu yang sah dan adil. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan sistem hukum terkait pemilu dapat semakin kuat dan dapat menjaga integritas demokrasi di Indonesia dengan baik. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan demokrasi di negara ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemantau pemilu, dan masyarakat sangat penting. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menjamin pemilu yang transparan, adil, dan demokratis, sehingga dapat menjamin bahwa suara rakyat benar-benar diwakili dan demokrasi beroperasi dengan baik.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga pemilihan umum, media massa, dan berbagai pihak terkait lainnya (Mubarok, 2023). Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye sosial, diskusi publik, pelatihan bagi pemilih, dan penyuluhan mengenai pentingnya pemilu. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap

proses pemilu juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap suara rakyat benar-benar dihitung dan hasilnya mencerminkan kehendak mayoritas.

Sanksi tidak proporsional terhadap tingkat pelanggaran dapat menjadi salah satu upaya untuk menjamin keberlangsungan proses pemilu yang adil dan transparan. Hal ini dapat mencakup denda yang lebih berat bagi pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atau secara sistematis, serta diskualifikasi bagi calon atau partai politik yang terlibat dalam kecurangan. Sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan kecurangan dan memperkuat proses pemilu secara keseluruhan. Selain itu, peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran juga sangat penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dalam negara.

Hal ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar diwakili dalam pemilihan umum. Selain itu, masyarakat harus terus dididik tentang pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilu karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kemajuan demokrasi negara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi mereka dalam proses pemilu harus terus dilakukan agar pemilu dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Tidak semua pelanggaran memiliki efek jera, namun dengan adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, diharapkan pelaku pelanggaran akan lebih berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar aturan. Selain itu, transparansi dan keterbukaan dalam proses pemilu juga dapat menjadi langkah preventif

untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, pemilu yang dilaksanakan dapat lebih fair dan akuntabel, sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pemilu harus terus ditingkatkan demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada.

Peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi juga dapat dicapai melalui transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Sistem pemilu yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan lancar dan adil. Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk media, Selain itu, penting bagi LSM dan lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu, pemilu dapat menjadi wahana yang efektif untuk mengekspresikan kehendak rakyat dan memilih pemimpin yang representatif dan berkualitas.

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemilu juga sangat penting untuk menjamin keberhasilan proses demokrasi. Masyarakat perlu terlibat dalam pemilihan dengan memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Melalui kesadaran dan partisipasi aktif ini, kita dapat membangun negara yang lebih demokratis dan berdaya.

Hal lain yaitu beberapa pasal tidak operasional dalam praktik, meskipun demikian masih terdapat beberapa hambatan yang menghalangi suara rakyat untuk benar-benar terwakili dalam proses demokrasi kita. Salah satu contohnya adalah adanya pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak dijalankan secara efektif dalam praktiknya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam

partisipasi politik masyarakat dan merugikan prinsip demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem demokrasi kita agar dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dan didengar dalam setiap aspek kehidupan politik negara.

Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus, diharapkan sistem demokrasi kita dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Selain itu, pendidikan politik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa negara kita benar-benar mewakili kehendak dan kepentingan rakyatnya.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik dan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan agar rakyat dapat mempercayai institusi politik dan memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di negara kita. Ini akan mendorong partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dan membantu menjaga keadilan dan stabilitas sistem politik kita. Dengan demikian, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi generasi mendatang dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka.

Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana untuk Menjamin Pemilu yang Jurdil

Reformulasi dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum, mengurangi

risiko penyalahgunaan kekuasaan. Memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Dengan reformulasi sanksi pidana, kita dapat memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dapat terjaga. Selain itu, reformulasi ini juga dapat menjadi langkah awal menuju perbaikan sistem hukum secara keseluruhan, sehingga keadilan dapat terwujud bagi semua warga negara.

Melihat inefektivitas ini, reformulasi sanksi pidana pemilu menjadi suatu urgensi untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Reformulasi hukum ini bertujuan untuk memperbarui dan meningkatkan ketentuan hukum yang ada agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sanksi yang lebih tegas dan efektif, diharapkan akan menekan angka pelanggaran pidana dalam pemilu, memastikan kelancaran proses demokrasi di Indonesia, dan memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku kecurangan.

Dengan adanya reformulasi sanksi pidana, para pelaku kecurangan dalam pemilu akan lebih berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini akan membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap pemilih memiliki hak yang sama dalam proses demokrasi. Transparansi dan akuntabilitas juga akan menjadi prioritas utama dalam proses hukum, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat. Dengan demikian, pemilu yang berjalan dengan jujur dan adil akan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada (Kirana et al., 2024).

Menjamin keadilan bagi peserta dan pemilih dapat dilakukan melalui transparansi dalam proses pemilu, penegakan hukum yang

adil, serta pendidikan politik yang memadai bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat demokrasi sebagai fondasi utama negara ini. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kita dapat memastikan bahwa keadilan dan kebenaran tetap menjadi pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem demokrasi dan hak-hak politik yang dimiliki. Melalui pendidikan politik yang memadai, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pemilihan umum dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan diakui dalam pembentukan kebijakan publik. Partisipasi aktif dalam pemilu bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak yang harus dilindungi dan didukung oleh semua pihak (Muhtar et al., 2024). Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan individu adalah kunci dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, penting bagi masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem demokrasi dan hak-hak politik yang dimiliki. Melalui pendidikan politik yang memadai, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pemilihan umum dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan diakui dalam pembentukan kebijakan publik. Partisipasi aktif dalam pemilu bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak yang harus dilindungi dan didukung oleh semua pihak. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan individu adalah kunci dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan politik juga dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi politik yang

diterima dan menghindari penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat merusak proses demokrasi.

Pendidikan politik juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem politik, proses pemilihan umum, dan peran masing-masing lembaga dalam menjalankan pemerintahan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih efektif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memperjuangkan kepentingan mereka melalui mekanisme demokrasi yang ada. Selain itu, pendidikan politik juga dapat membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik sebagai bentuk tanggung jawab kewarganegaraan. Melalui pendidikan politik, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan bertanggung jawab dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan.

Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan adil juga dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan kekacauan sosial yang dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk terus melakukan reformasi dalam sistem hukumnya guna memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.

Langkah-langkah reformasi dalam sistem hukum harus dilakukan agar memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Hal ini akan membantu memperkuat fondasi demokrasi dan menjaga stabilitas serta keamanan dalam sebuah negara. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi, karena para pelaku usaha akan merasa lebih aman dan terlindungi oleh hukum. Dengan

demikian, sistem hukum yang baik dan berfungsi dengan baik akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan suatu negara (Orlando, 2022). Dengan demikian, pembaruan dalam sistem hukum merupakan salah satu upaya penting dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya hukum dan patuh terhadap aturan yang berlaku (Purba, 2017).

Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pelanggaran administratif dan pidana berbeda akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum saat ini. Dengan demikian, sistem hukum dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memberi tahu orang tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti melalui kampanye publik, seminar, atau program pendidikan hukum di sekolah-sekolah.

KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum efektif dalam mencegah pelanggaran serta mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Inefektivitas ini disebabkan oleh kelemahan normatif seperti rumusan yang multitafsir, ancaman hukuman yang tidak memberikan efek jera, serta kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Oleh karena itu, reformulasi sanksi pidana menjadi suatu urgensi krusial untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan meningkatkan integritas proses demokrasi di Indonesia. Direkomendasikan agar reformulasi hukum dilakukan secara komprehensif untuk menghasilkan sanksi yang lebih tegas, proporsional, dan operasional, didukung oleh peningkatan koordinasi antarlembaga serta partisipasi aktif masyarakat demi terwujudnya sistem pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Untuk mengoptimalkan penegakan hukum pemilu dan mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil, direkomendasikan agar pemerintah dan legislator memprioritaskan reformulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Reformulasi ini harus berorientasi pada penciptaan rumusan sanksi yang lebih jelas, tegas, proporsional, serta mampu memberikan efek jera yang kuat terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan *money politics*, sekaligus memastikan sanksi dapat dioperasionalkan secara efektif. Selain itu, penting untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum terkait lainnya guna mengatasi tantangan prosedural dan memastikan penanganan perkara yang efisien dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang. Bersamaan dengan itu, intensifikasi edukasi dan sosialisasi hukum pemilu kepada masyarakat luas, serta penguatan peran organisasi masyarakat sipil dan media dalam pengawasan, menjadi krusial untuk mendorong partisipasi bertanggung jawab dan mencegah pelanggaran. Terakhir, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sanksi dan mekanisme penegakan hukum perlu dilakukan agar sistem hukum pemilu senantiasa adaptif dan relevan dengan dinamika demokrasi.

REFERENSI

- Azis, J. A., & Azhar, A. (2024). Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Pemberian Sanksi Terhadap Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Serentak Wilayah Hukum Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir. *Indragiri Law Review*, 2(2), 24–32.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. " *Khazanah Hukum* 2, No 1 (2020).
- Chairy Maghfirah Dasraf. (2024). *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum*

(Bawaslu) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Di Indonesia Pada Tahun 2019 Dan 2024.

Kewarganegaraan Transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146–153.

Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busyra Azheri, and Muhammad Ichsan Kabullah. "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling." *Jurnal Konstitusi*, 2020.

Rusmana, I. P. E. (2024). Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Rechtsens*, 13(2), 261–284.

Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11–26.

Taufiqurrahman, M., & Amal, B. K. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat. *Jurnal Dharma Agung*, 30(2), 403–412.

Undang-Undang No 7. (2017). Pemilihan Umum. *Jakarta: Sekretariat Negara*.

Moeljatno, S. H. (2021). *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.

Mubarok, A. A. (2023). Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum. *Lanterana: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 107–118.

Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., Setiawan, E. B., Jenar, S., Putri, F. A. W., & Taufik, A. (2024). *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka.

Undang-Undang Dasar 1945. (2001). Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar. *Jakarta, Indonesia: Wwww. Mpr. Go. Id*.

Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. VI. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Purba, I. P. (2017). Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan